

| INDUSTRI P2P LENDING |

MENANTI KONSOLIDASI BISNIS PINJOL

Bisnis, JAKARTA — Konsolidasi industri pinjaman online atau pinjol agaknya tidak dapat terhindarkan sebagai dampak dari terus meningkatnya standar modal minimum perusahaan dari otoritas. Jelang penerapan ekuitas minimum Rp12,5 miliar pada Juli, jumlah pinjol kurang modal terus bertambah.

Akbar Maulana & Rinaldi Azka
redaksi@bisnis.com

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman, menerangkan ada sekitar 15 dari 96 penyelenggara LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) atau pinjol yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp7,5 miliar per Juni 2025.

Padahal, data per Mei 2025, ada 12 penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan itu. Dari 15 penyelenggara pinjol tersebut, empat penyelenggara sedang dalam proses analisis atas permohonan peningkatan modal disetor.

"Selain itu, belum terdapat penyelenggara yang mengajukan pengembalian izin usaha karena tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum maupun mengajukan izin untuk merger atau akuisisi," tuturnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/6).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lanjutnya, melakukan beberapa upaya pengawasan terkait dengan pemenuhan ekuitas minimum Rp12,5 miliar yang akan mulai berlaku efektif pada 4 Juli 2025.

OJK, terangnya, sudah menyampaikan surat kepada seluruh penyelenggara *peer-to-peer* (P2P) *lending* untuk dapat memenuhi dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar sebelum 4 Juli 2025.

Kemudian, meminta *action plan* dan *timeline* pemenuhan ekuitas minimum bagi penyelenggara pinjol yang ekuitasnya masih di bawah Rp12,5 miliar.

Selanjutnya, otoritas juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan *action plan* upaya

pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari *strategic investor* lokal atau asing yang kredibel.

Terlepas dari ketentuan modal minimum, konsolidasi pemain pinjol memang terus terjadi. Hingga Juni 2025, OJK telah mencabut izin usaha tujuh penyelenggara LPBBTI. Pencabutan izin usaha itu dilakukan karena pengembalian izin usaha dari penyelenggara ataupun penenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang berlaku.

Selain itu, OJK juga tengah melakukan kajian membuka moratorium pendirian pinjol. Namun, sejumlah prakondisi terus disiapkan.

"Kesiapan infrastruktur dan kondisi industri LPBBTI sebagai prakondisi dibukanya moratorium LPBBTI, terus dilakukan pendalaman. Hal ini dilakukan untuk mendukung penguatan dan pengembangan industri pinjol, khususnya dalam mendorong pembiayaan sektor-sektor produktif, serta memperkuat permodalan melalui peningkatan ekuitas dari penyelenggara saat ini," tambahnya.

Adapun, *outstanding* pembiayaan LPBBTI per April 2025 tumbuh 29,01% *year-on-year* (YoY), dengan nominal sebesar Rp80,94 triliun.

Melihat tren pembiayaan tersebut, industri P2P *lending* diproyeksikan akan terus tumbuh positif sesuai dengan *Roadmap*

Pengembangan dan Penguatan LPBBTI tahun 2023—2028.

Sementara itu, tingkat kredit bermasalah (TWP90) atau kredit macet industri pinjol per April 2025 tercatat sebesar 2,93%, masih terjaga di bawah 5%. OJK terus melakukan penguatan industri dalam rangka mitigasi risiko gagal bayar sejalan dengan peta jalan pengembangan.

Penguatan tersebut melalui pengelolaan kualitas *credit scoring* dengan adanya kewajiban menyusun pedoman penilaian *credit scoring* sebagaimana diatur dalam POJK 40/2024. OJK juga menerbitkan POJK 42/2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) yang juga berlaku bagi industri pinjol, serta penguatan pengaturan mengenai pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) melalui perubahan SEOJK 19/2023 yang akan segera diterbitkan.

Adapun, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan bahwa saat ini masih terjadi *tech winter*, di mana pendanaan bagi ekosistem digital sangat terbatas.

Dalam situasi tersebut, menurutnya kesempatan mendapatkan permodalan bagi P2P *lending* makin kecil. Apalagi ditambah dengan ada beberapa kasus perusahaan pinjol yang makin memberatkan perusahaan untuk mendapatkan

“Ketika persyaratan modal tidak terpenuhi, salah satu jalannya adalah melakukan merger dengan perusahaan sejenis atau mereka diakuisisi ...

tambahan permodalan.

"Mereka juga secara tidak langsung didorong oleh OJK untuk merger ataupun akuisisi. Ketika persyaratan modal tidak terpenuhi, salah satu jalannya adalah melakukan merger dengan perusahaan sejenis atau mereka diakuisisi oleh perusahaan digital lainnya untuk menamb

UPAYA MERGER

Huda memahami bila merger dilakukan akan makin sedikit entitas perusahaan *fintech* P2P *lending* yang diawasi OJK. Namun demikian, tujuan untuk meningkatkan kualitas industri P2P *lending* dapat terwujud.

Menurutnya, dalam berbisnis

modal memang merupakan aspek vital yang harus kuat, terlebih bagi industri keuangan yang berhubungan dengan finansial masyarakat, seperti *fintech* P2P *lending*.

"Ketika gagal bayar, tentu modal tersebut bisa jadi jaminan bahwa perusahaan mampu meng-handle ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka aspek kecukupan modal ini menjadi dasar penting bagi kesehatan industri," tegasnya.

Namun demikian, dia memberikan catatan. Dengan fakta di lapangan bahwa perusahaan pinjol yang kurang modal justru bertambah banyak, menurutnya, OJK juga harus realistis terhadap kondisi industri.

"Saat ini, pendanaan untuk semua industri digital atau teknologi sedang berat, termasuk juga untuk industri pinjaman daring. Ketika ada kasus yang menyeret industri pinjaman daring akan lebih menurunkan minat investor, meskipun kinerja juga baik," tandasnya.

Menanggapi kondisi industri, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafer menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh keuntungan dari bisnis yang dijalankan masing-masing perusahaan.

"Banyak faktor yang memengaruhi besarnya ekuitas setiap penyelenggara, salah satunya adalah keuntungan yang diperoleh tidak mampu menambah jumlah ekuitas, malah ada beberapa penyelenggara yang ekuitasnya tergerus," ujar Entjik. ☒



Jalan di Tempat Pinjaman Produktif Fintech P2P Lending

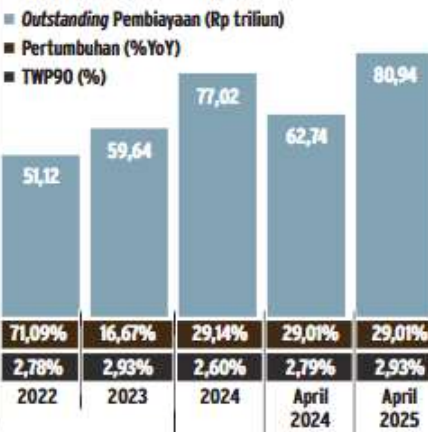
Laporan Laba Rugi Penyelenggara Fintech Lending (Rp miliar)

Akun	Februari 2024	Februari 2025	Perubahan (%)
Pendapatan Operasional			
Pendapatan atas Pengembalian Pinjaman/Komisi (ujrah)	1.643,95	2.709,46	0,65
Pendapatan atas Pemberian Pinjaman	333,90	-	(1,00)
Pendapatan atas Denda	45,47	50,43	0,11
Jumlah Pendapatan Operasional	2.023,32	2.759,90	0,36
Jumlah Beban Operasional	1.880,58	2.447,31	0,30
Laba (Rugi) Operasional	142,74	312,59	1,19
Jumlah Pendapatan Non Operasional	47,72	48,67	0,02
Jumlah Beban Non Operasional	251,76	21,10	(0,92)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(61,31)	340,16	(6,55)
Beban Pajak	36,25	106,45	1,94
Laba (Rugi) Setelah Pajak	(97,56)	233,71	(3,40)
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya	0,03	-	(1,00)
Laba (Rugi) Komprehensif	(97,53)	233,71	(3,40)

Sumber : OJK, diolah

- Jumlah perusahaan pinjaman online (pinjol) yang kekurangan modal minimal dari standar aturan Rp7,5 miliar terus bertambah menjadi 15 perusahaan dari sebelumnya 12 perusahaan per Mei 2025. Kondisi ini terjadi saat aturan modal minimal bakal kembali naik menjadi Rp12,5 miliar pada Juli 2025.
- Dari total 97 pemain *peer-to-peer* (P2P) *lending*, hal ini akan memicu jumlah pinjol kurang modal semakin bertambah. Opsi konsolidasi hingga suntik modal dari pemilik atau investor baru kian *urgent* agar perusahaan dapat tetap bertahan.

Kinerja P2P Lending



Porsi Penyaluran Pinjaman P2P Lending per Februari 2025

Uraian	Februari 2024	Februari 2025	Perubahan
Total Penyaluran Pinjaman	20.904,11	26.901,15	28,69%
Jumlah Penyaluran Pinjaman Sektor Produktif	9.097,33	7.598,54	-16,48%
Persentase Penyaluran Pinjaman ke Sektor Produktif	43,52%	28,25%	
Jumlah Penyaluran Pinjaman Sektor Konsumtif	11.806,78	19.302,61	63,49%
Persentase Penyaluran Pinjaman ke Sektor Konsumtif	56,48%	71,75%	

BISNIS/RADITYO EKO